

4. Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
5. Kemudian PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga): a. lembar pertama disimpan oleh PPAIW, b. lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota Kepala daerah cq. Kepala badan Pertanahan Nasional Kabupaten, dan c. lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut

Sedangkan salinannya dibuat rangkap 4 (empat): a. salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif, b. salinan lembar kedua disampaikan kepada nazir, c. salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag, dan d. salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sedangkan prosedur pendaftaran perwakafan tanah yang telah terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1978 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah sebagai berikut:

1. Tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum berlakunya PP pendaftarannya dilakukan oleh nazir yang bersangkutan kepada KUA setempat.
2. Apabila nazir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya anak keturunan nazir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat.
3. Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang mau mendaftarkannya maka Kepala Desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat.
4. Pendaftaran yang dilakukan oleh nazir, wakif, ahli warisnya anak keturunan nazir, anggota masyarakat yang mengetahuinya atau Kepala Desa harus disertai dengan:
 - a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
 - b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi *istifdhah* (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).
5. Pada saat PPAIW menerima laporan dan pendaftaran perwakafan tanah tersebut, maka pertama kali yang dilakukan PPAIW adalah sebagai berikut:
 - a. Meneliti keadaan tanah wakaf dengan cara memeriksa surat/surat-surat yang dilampirkan/disertakan pada surat permohonan pendaftaran perwakafan tanah.

- c. AIW atau APAIW yang dibuat oleh PPAIW setempat.
 - d. Surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari KUA setempat.
 - e. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, ikatan, sitaan dan tidak dijaminkan di bank yang diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat.
 - f. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
 - g. Identitas waqif dan nazir (Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang).
3. Untuk tanah yang belum terdaftar, persyaratannya sama seperti diatas tetapi karena belum ada Sertifikat Hak Milik, maka diganti dengan bukti tertulis lain yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
- a. Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.
 - b. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
 - c. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebutkan didalamnya.

- d. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- e. Akta Pemindahan Hak yang di buat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan.
- f. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hakyang diwakafkan.
- g. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.
- h. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai dengan alas hak yang dialihkan.
- i. Surat Penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah.
- j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan.

